

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MELALUI PROGRAM USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA BANK

Andi Irdan Atjo Mea¹, Zulkarnain Umar², Muhlis Hafel³, Anfas⁴

Universitas Terbuka^{1,3,4}, Universitas Islam Makassar²

andiirdan@gmail.com¹, zulnaik77@gmail.com², muhlis@ecampus.ut.ac.id³,
anfas_st_mm@ecampus.ut.ac.id⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh Edward III, yaitu model komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi melalui program Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada BRI Kantor Cabang Majene. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, implementasi kebijakan pemerintah melalui program UMKM pada BRI Kantor Cabang Majene meliputi, 1) model komunikasi dalam implementasi kebijakan pemerintah melalui program UMKM di BRI Cabang Majene, dapat direalisasikan dengan baik melalui komunikasi yang efektif antara petugas BRI dengan pelaku UMKM sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama; 2) model sumberdaya dalam implementasi kebijakan pemerintah di sektor UMKM dapat berjalan lancar karena didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan handal; 3) model disposisi dalam implementasi kebijakan pemerintah di sektor UMKM, yaitu karakter, sikap atau perilaku pada diri implementor dimana karakter utama yang diharapkan adalah kejujuran. Dalam hal ini, sikap dan karakter petugas BRI Cabang Majene dalam memberikan pelayanan sangat profesional dan simpatik, sehingga pelaku UMKM antusias untuk mengembangkan usahanya secara jujur dan transparan, karena kunci kesuksesan terletak pada kejujuran dan kepercayaan, dan 4) model struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pemerintah di sektor UMKM ditemukan mekanisme pelaksanaan UMKM pada BRI Cabang Majene dibuat sangat sederhana dan mudah dipahami oleh Nasabah khususnya pelaku UMKM, dimana struktur organisasi BRI Kantor Cabang Majene juga cukup memadai, yaitu Pimpinan Cabang, Asisten Manajer Pemasaran, Kepala Unit, dan Materi. Simpulan, implementasi kebijakan pemerintah melalui program UMKM pada BRI Kantor Cabang Majene meliputi, a) komunikasi dalam melakukan implementasi kebijakan pemerintah melalui program Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada BRI Kantor Cabang Majene, berdasarkan fakta dilapangan belum berjalan secara maksimal karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya kredit KUR yang relatif sangat membantu tambahan modal dengan suku bunga yang juga relatif sangat rendah bagi pengusaha UMKM; b) sumber daya dalam implementasi kebijakan pemerintah melalui program UMKM pada BRI Kantor Cabang Majene, masih terbatasnya sumber daya dan peningkatan SDM agar pemasaran kredit KUR dapat berjalan dengan baik sehingga daerah-daerah pelosok yang jauh dari BRI Kanca Majene dapat dilayani dengan baik; c) disposisi dalam implementasi kebijakan pemerintah melalui program UMKM pada BRI Kantor Cabang Majene, adalah terkait dengan sikap petugas lapangan yang belum secara maksimal dimana masih banyak komplein dari nasabah mengenai proses kredit yang masih dianggap lambat oleh nasabah; d) struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pemerintah melalui program UMKM pada BRI Kantor Cabang Majene, meliputi dua hal yaitu mekanisme pelaksanaan program UMKM sesuai dengan standar

operasional prosedur (SOP) dan struktur organisasi BRI Kantor Cabang Majene. pada BRI Cabang Majene dibuat sangat sederhana dan mudah dipahami oleh Nasabah khususnya pelaku UMKM, namun tentang pengurusan administrasi pemerintah setempat masih perlu dibenahi seperti pengurusan surat keterangan usaha untuk kelengkapan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of the policies offered by Edward III, namely the communication model, resources, disposition, and bureaucratic structure through the Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) program at BRI's Majene Branch Office. The method used is qualitative with phenomenological research type. The data analysis used is descriptive qualitative. The results show that the implementation of government policies through the MSME program at the BRI Majene Branch Office includes, 1) the communication model in implementing government policies through the MSME program at the BRI Majene Branch, can be realized properly through effective communication between BRI officers and MSME actors according to the provisions laid down. has been mutually agreed; 2) the resource model in implementing government policies in the MSME sector can run smoothly because it is supported by professional and reliable human resources; 3) the disposition model in implementing government policies in the MSME sector, namely the character, attitude or behavior of the implementor where the main character expected is honesty. In this case, the attitude and character of the BRI Branch Majene officers in providing services are very professional and sympathetic, so that MSME actors are enthusiastic to develop their business honestly and transparently, because the key to success lies in honesty and trust, and 4) the model of the bureaucratic structure in implementing government policies. in the MSME sector, it was found that the MSME implementation mechanism at the BRI Majene Branch was made very simple and easily understood by customers, especially MSME players, where the organizational structure of the BRI Majene Branch Office was also quite adequate, namely Branch Managers, Assistant Marketing Managers, Unit Heads, and Materials. In conclusion, the implementation of government policies through the MSME program at the BRI Majene Branch Office includes, a) communication in implementing government policies through the Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) program at the BRI Majene Branch Office, based on the facts in the field that it has not run optimally because there are still many people who do not know about the existence of KUR credit which is relatively very helpful for additional capital with relatively very low interest rates for MSME entrepreneurs; b) resources in implementing government policies through the MSME program at BRI's Majene Branch Office, still limited resources and human resource development so that KUR credit marketing can run well so that remote areas far from BRI Kanca Majene can be served properly; c) disposition in implementing government policies through the MSME program at BRI's Majene Branch Office, which is related to the attitude of field officers who have not been optimally where there are still many complaints from customers regarding the credit process which is still considered slow by customers; d) bureaucratic structure in implementing government policies through the MSME program at BRI's Majene Branch Office, covering two things, namely the mechanism for implementing the MSME program in accordance with standard operating

procedures (SOP) and the organizational structure of BRI's Majene Branch Office. at the BRI Majene Branch, it is made very simple and easy to understand by customers, especially MSME players, but regarding the administration of local government still needs to be addressed such as processing business certificates for completeness.

Keywords: *Implementation, Policy, Micro, Small and Medium Enterprises*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran dan kontribusi yang penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu menyediakan lapangan kerja yang luas dan memberikan sumbangan cukup signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, pada tahun 2012 UMKM menyediakan lapangan kerja sebesar 97,2% dari total lapangan kerja dan menyumbangkan sekitar 56,5% PDB Indonesia. Pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada Tahun 2013 jumlah UMKM bertambah menjadi 57,9 juta unit dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat mencapai 114,1 juta orang (Kemenko Perekonomian, 2015). Tahun 2019 meningkat menjadi 64,7 juta UMKM, namun karena dampak Covid-19 tahun 2020 jumlahnya turu menjadi 34 juta (Anfas, 2020).

Untuk meningkatkan usaha, pemerintah terus berupaya memberikan bantuan modal berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM. Di Kabupaten Majene, bantuan modal usaha yang diberikan kepada 454 pelaku UMKM yang dibagi dalam dua kecamatan, yaitu Kecamatan Banggae sebanyak 207 pelaku UMKM dan yang di Kecamatan Banggae Timur sebanyak 247 pelaku UMKM. Jumlah penerima KUR tersebut tentunya masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada di kabupaten Majene yakni sebanyak 7.000 pelaku UMKM.

Minimnya jumlah UMKM yang mampu mengakses KUR tentunya disebabkan oleh kurangnya informasi terhadap kebijakan pemerintah yang dapat diakses oleh pelaku UMKM. Untuk itu dalam teori George C. Edward III (1983), agar kebijakan dapat terimplementasi dengan baik, maka perlu adanya 4 variabel pendukung, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sebagaimana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi suatu kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden No.

6 Tahun 2007 memiliki tujuan untuk Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, khususnya dibidang Reformasi Sektor Keuangan. Instruksi Presiden tersebut ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah, Lembaga Penjaminan, dan Perbankan pada tanggal 09 Oktober 2007 sebagaimana kemudian diubah dengan addendum pada tanggal 14 Mei 2008 tentang Penjaminan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi atau yang lebih populer dengan istilah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut Retnadi (2008) dalam Rachmawati (2012) melalui KUR, pemerintah mengharapkan adanya percepatan serta pengembangan kegiatan perekonomian terutama di sektor riil, dalam rangka penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Hasil Penelitian Eka & Wulandary (2019), menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah memberikan dampak positif terhadap masyarakat di Kota Batu. Dimana terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal, terbukannya lapangan pekerjaan, kemiskinan berkurang, serta dampak sosial yang terlihat adanya kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan, terjalin komunikasi dan koordinasi antara masyarakat melalui penguyuban usaha Kota Batu, serta menjadi percontohan produk olahan bagi daerah sekitar Jawa Timur dan diluar pulau.

Sementara dari hasil penelitian Astono et al., (2019) menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan UMKM belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dari segi komunikasi belum efektif karena masih ada beberapa pelaku usaha kecil yang tidak tahu jika ada sosialisasi atau pelatihan mengenai pemberdayaan usaha kecil. Dari segi sumber daya implementasi kebijakan belum berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan dimana kurangnya penguasaan IPTEK dari pelaku usaha kecil, kurangnya pengelolaan manajemen, dan cenderung kekurangan modal. Dari segi permodalan dinas terkait menjelaskan bahwa telah memfasilitasi pihak UKM agar dapat bermitra dengan BUMN dan Perbankan agar dapat menambah modal bagi para pelaku usaha. Keadaan tersebut dapat mematikan mata pencaharian.

Dari segi disposisi, sikap, dan karakteristik implementor sudah baik, yaitu dimana implementor telah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil dalam membuka izin usaha. Salah satu contohnya dengan memberi kemudahan untuk UKM dalam mendaftarkan usahanya, membantu UKM agar dapat menyetok usaha dagangannya

ke ritel yang lebih besar. Struktur Birokrasi sudah baik. Setiap implementor sudah mengerjakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti melakukan kajian untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh Edward III, yaitu model komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi melalui program Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada BRI Kantor Cabang Majene.

KAJIAN TEORI

Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Lester & Stewart dalam Agustino (2008), adalah sebagai tahap penyelenggaraan kebijakan segerasetelah ditetapkan menjadi undang-undang. Selanjutnya mengenai tentang implementasi kebijakan diartikan sebagai pengadministrasian undang-undang kedalam berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik-teknik yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dan dampak yang ingin diupayakan oleh kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Lebih lanjut menurut Metter & Horn dalam Agustino (2008), bahwa implementasi kebijakan ialah tindakan-tindakan yang dilakukan baikoleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dengan demikian, esensi utama dari suatu implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.

Pengertian kebijakan publik itu sendiri memiliki makna yang luas, masing-masing definisi memberi pendekatan yang berbeda-beda, karenanya diperlukan batasan-batasan ataupun konsep kebijakan publik. Usaha pemerintah untuk merespons kepentingan publik ini adalah yang disebut dengan kebijakan publik. Robert Eyestone mengatakan secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu

unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep yang ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang begitu luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal (Winarno, 2008).

Selanjutnya menurut Carl Friedrich memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan serta mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Definisi ini mencakup dimensi yang luas karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan oleh kelompok ataupun individu. James Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah ataupun persoalan (Winarno, 2008).

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan adalah suatu pilihan pemerintah untuk menentukan langkah atau tidak berbuat. Kebijakan itu tertuang dalam program yang diarahkan kepada pencapaian tujuan, nilai, dan praktek. Sehingga dapat dirumuskan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat (Lubis, 2007).

Berdasarkan definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa sebenarnya kebijakan publik secara sederhana ini merupakan aktivitas-aktivitas pemerintah yang memiliki tujuan dan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat banyak atau publik, aktivitas yang dikerjakan atau tidak oleh pemerintah. Kebijakan publik menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan negara. Semua negara menghadapi masalah yang relatif sama, yang berbeda adalah bagaimana respons terhadap masalah tersebut. Respons ini yang disebut sebagai kebijakan publik.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa UMKM adalah sebuah program yang dibuat oleh pemerintah sebagai bentuk aplikasi dari kebijakan publik yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Seperti yang dikemukakan oleh Grindle (Wahab, 1990), implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut-paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia

menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang terpenting dari keseluruhan proses kebijakan. Ini telah menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara antara perumusan kebijakan dengan implementasi kebijakan, dalam arti, walaupun perumusan dilakukan dengan sempurna, namun apabila proses implementasi tidak bekerja sesuai persyaratan, maka kebijakan yang semula baik akan menjadi jelek dan begitu pula sebaliknya.

Menurut Edward (1983), implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dapat dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu dapat mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik, dapat mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Menurut Drucker (dalam Eriza, 2006) merumuskan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah digariskan terlebih dahulu. Selanjutnya Wibawa (dalam Tangkilisan, 2003) berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Kebijakan saat ini masih banyak berorientasi pada nasihat dan rancangan para pakar dan kaum elit tanpa melibatkan masyarakat dalam suatu debat dan musyawarah publik. Pola kebijakan seperti ini masih dianggap sebagai kebijakan tradisional dan cenderung mengarah pada tindakan yang otoriter dan belum tercerahkan semangat musyawarah (*deliberation*) untuk mencapai mufakat (*consensus*) dalam demokrasi yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kebijaksanaan merupakan suatu pedoman yang menyeluruh guna mencegah terjadinya penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Kebijaksanaan juga merupakan suatu rencana yang mengarah pada daya pikir dari pengambilan keputusan kearah tujuan yang diinginkan. Kebijakan mungkin terjadi dan berasal dari seperangkat keputusan yang tampaknya tetap untuk hal-hal yang sama.

Program KUR Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Ketersediaan lapangan pekerjaan pada sektor formal yang terbatas serta krisis ekonomi yang kerap melanda Indonesia membuat masyarakat harus berjuang lebih keras untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hal ini mendorong masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi dirinya dan orang lain dengan mendirikan usaha sendiri di luar sektor formal. Usaha-usaha dengan skala tidak terlalu besar inilah yang kemudian disebut Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha ini dapat bergerak dalam bidang perdagangan, jasa, konstruksi, transportasi, dan industri, serta jenis usaha lainnya. UMKM telah terbukti dapat bertahan dalam krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan memiliki kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

KUR merupakan bagian integral dari pelaksanaan kebijakan INPRES 6/2007 tentang Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. KUR sendiri pertama kali diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 5 November 2007. Dalam hal ini bahwa Implementasinya berpangkal pada Nota Kesepahaman Bersama antara Instansi/ departemen teknis, perbankan, dan perusahaan penjaminan.

KUR merupakan aktualisasi dari siasat inovatif untuk menciptakan hubungan yang saling melengkapi dan saling mengisi antara sektor finansial dan sektor riil, yang terstruktur sebagai sindikasi pembiayaan nasional yang bersifat lintas fungsional, lintas sektoral, dan lintas regional; bersentuhan langsung dengan aspek makro dan mikro ekonomi; dan berorientasi pada keselarasan antara segi pertumbuhan dan pemerataan. KUR bertujuan untuk dapat memperkuat serta kemampuan permodalan UMKM melalui penerapan skim penjaminan kredit.

Penyaluran KUR dilaksanakan secara serempak oleh BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri (BSM), dan BUKOPIN. Khusus terhadap penyaluran KUR ini pemerintah memberikan jaminan sebesar 70% melalui Perum Jaminan Kredit Indonesia.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Majene merupakan salah satu pelaku sektor perbankan yang menjadi fasilitator penyalur kredit modal usaha yang berada di Sulawesi Barat. Bank ini juga telah menyediakan kredit konsumtif dan produktif. Kredit konsumtif merupakan kredit yang disediakan bank kepada debitur untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti kredit kendaraan bermotor, kredit Pemilikan Rumah (KPR),

dan kredit Pegawai, sedangkan kredit produktif yaitu kredit yang disediakan pihak bank kepada debitur untuk mengembangkan usaha, seperti Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi. Kredit investasi dan kredit modal kerja merupakan kredit produktif karena digunakan untuk keperluan bisnis atau usaha, baik berupa modal kerja maupun investasi pembelian asset perusahaan, sehingga dapat pula menghasilkan dikemudian hari. Sedangkan kredit konsumtif ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Peneliti memilih metode pendekatan kualitatif karena penulis ingin memaparkan atau mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam mengembangkan UMKM dan kendala-kendala yang terjadi selama proses implementasi tersebut.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan, implementasi kebijakan pemerintah melalui program UMKM pada BRI Kantor Cabang Majene meliputi beberapa Hal. Pertama, model komunikasi dalam implementasi kebijakan pemerintah melalui program UMKM di BRI Cabang Majene. dapat direalisasikan dengan baik melalui komunikasi yang efektif antara petugas BRI dengan pelaku UMKM sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama. Kedua, model sumberdaya dalam implementasi kebijakan pemerintah di sektor UMKM dapat berjalan lancar karena didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan handal.

Ketiga, model disposisi dalam implementasi kebijakan pemerintah di sektor UMKM, yaitu karakter, sikap atau perilaku pada diri implementor dimana karakter utama yang diharapkan adalah kejujuran. Dalam hal ini, sikap dan karakter petugas BRI Cabang Majene dalam memberikan pelayanan sangat profesional dan simpatik, sehingga pelaku UMKM antusias untuk mengembangkan usahanya secara jujur dan transparan, karena kunci kesuksesan terletak pada kejujuran dan kepercayaan. Keempat, model struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pemerintah di sektor UMKM ditemukan mekanisme pelaksanaan UMKM pada BRI Cabang Majene dibuat sangat

sederhana dan mudah dipahami oleh Nasabah khususnya pelaku UMKM. Dimana struktur organisasi BRI Kantor Cabang Majene juga cukup memadai, yaitu Pimpinan Cabang, Asisten Manajer Pemasaran, Kepala Unit, dan Materi.

PEMBAHASAN

Model Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah melalui Program UMKM Pada BRI Kantor Cabang Majene

Komunikasi yang dimaksud dalam sub bahasan ini adalah setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program dengan para kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran dari program atau kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan serta kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

Berdasarkan Edward dalam Agustino (2012), model komunikasi dalam implementasi kebijakan pemerintah memiliki pengaruh besar dan utama dalam menentukan keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan. Komunikasi (atau pentransmisiian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan.

Sejak era orde baru sampai saat ini kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah yang begitu pelik sehingga dengan banyaknya UKM yang baru muncul dan yang bertahan dari kerasnya proses industri kecil dan menengah (IKM) akan dapat mengurangi sedikit demi sedikit kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, seperti halnya model komunikasi yang dikembangkan melalui program UMKM pada BRI Cabang Majene mampu tumbuh lebih cepat dari usaha besar karena diberi peluang. Kehadiran UMKM yang tangguh dapat menjadi motivator dan menjadikan inspirasi bagi kalangan masyarakat yang menginginkan berwira usaha.

Model Sumberdaya dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah melalui Program UMKM Pada BRI Kantor Cabang Majene

Model sumberdaya yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah bahwa, setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia ialah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program atau kebijakan. Menurut Edward III (Widodo, 2010) mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan.

Pada tahun 1998 tepatnya saat terjadi krisis moneter di Indonesia membuat pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Majene mengalami masa-masa sulit dalam rangka keberlangsungannya. Sumber daya merupakan aspek yang begitu penting dalam menunjang implementasi sebuah kebijakan, hal ini dikarenakan seakuratnya sebuah komunikasi serta ketentuan yang begitu jelas tidak akan dapat melakukan suatu pekerjaannya dengan baik jika tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan pekerjaan tersebut secara efektif, maka dapat dikatakan kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Sumber daya dalam implementasi kebijakan menurut Teori Edward III dalam Agustino (2012), meliputi sumber daya manusia atau staff pelaksana kebijakan, sumber daya wewenang dan fasilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Begitu juga dengan kebijakan melalui program UMKM pada BRI Kantor Cabang Majene. Hal ini perkembangan Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengincar potensi Sulawesi Barat, khususnya Kabupaten Mamuju. Daerah ini memiliki potensi besar untuk dapat dikembangkan, karena dengan memiliki perkebunan kakao dan sawit yang sangat potensial. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat, BRI telah membuka tiga kantor cabang di tiga daerah, yakni: Majene, Mamuju dan Polewali Mandar. Keberadaan ketiga kantor cabang ini juga diperkuat dengan pendirian 30 kantor unit.

Model Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah melalui Program UMKM Pada BRI Kantor Cabang Majene

Model disposisi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam implementasi kebijakan yang menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan atau program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis, terkait dengan implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene terhadap program UMKM pada Kantor Cabang Majene.

George C Edward III mengemukakan bahwa disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias (Agustino, 2016).

Kebijakan dalam tahapan implementasi dapat dikatakan berhasil maupun tidaknya proses implementasi tidak terlepas dari peranan serta pelaksana. Implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik dan lancar jika para pelaksana kebijakan mengetahui dengan benar apa yang harus dikerjakan serta dalam setiap pelaksana memiliki kemampuan untuk memahami prosedur mengenai standard dan tujuan kebijakan yang diimplementasikan. Pengawasan yang dilakukan berkala akan berdampak pada efektifitasnya kinerja para pelaksana kebijakan dengan setiap pelaksana memiliki kemampuan yang baik.

Pengawasan terhadap sebuah pelaksanaan akan membuat standard dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan akan tetap terjaga. Dalam pelaksanaan kebijakan mengenai tentang pemberdayaan industri pengecoran logam ini diperlukanlah sebuah komitmen yang tinggi serta kejujuran dan sikap yang baik dalam melaksanakan kebijakan ini. Implementasi kebijakan pemerintah merupakan suatu hal yang harus dijalankan secara baik ditunjang dengan berbagai aspek pendukung yang mampu mensukseskan upaya perwujudan tentang implementasi kebijakan tersebut.

Model Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah melalui Program UMKM Pada BRI Kantor Cabang Majene

Struktur birokrasi yang dimaksud dalam pembahasan ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, yang pertama adalah mekanisme dan kedua struktur organisasi pelaksana sendiri, dalam hal ini struktur birokrasi pada BRI Kantor Cabang Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Implementasi kebijakan pemerintah yang merupakan suatu hal yang harus dijalankan secara baik ditunjang dengan berbagai aspek pendukung yang mampu untuk mensukseskan dalam upaya perwujudan untuk implementasi kebijakan tersebut.

George C. Edward III mengemukakan bahwa yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi (Agustino, 2016).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa, salah satu implementasi kebijakan diangkat dalam penelitian ini adalah di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dengan adanya kebijakan yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Agar tujuan tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka pemerintah dapat melakukan langkah-langkah kebijakan yang telah disepakati bersama untuk dapat di implementasikan kepadamasyarakat. Dalam hal ini, implementasi kebijakan perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut apakah implementasi kebijakan itu telah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan atau belum. Kebijakan yang dapat dikatakan berjalan dengan baik jika adanya suatu kerjasama yang baik pula dari semua pihak, baik dari pihak pemerintah yang selaku pelaksana dalam pembuatan kebijakan maupun antarorganisasi ke pemerintahannya yang berada di pusat maupun daerah serta masyarakat selaku pengawas agar dapat berjalannya kinerja pemerintah tersebut.

SIMPULAN

Komunikasi dalam melakukan implementasi kebijakan pemerintah melalui program Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada BRI Kantor Cabang Majene, berdasarkan fakta dilapangan belum berjalan secara maksimal karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya kredit KUR yang relatif sangat membantu tambahan modal dengan suku bunga yang juga relatif sangat rendah bagi pengusaha UMKM. Sumber daya dalam implementasi kebijakan pemerintah melalui program UMKM pada BRI Kantor Cabang Majene, masih terbatasnya sumber daya dan peningkatan SDM agar pemasaran kredit KUR dapat berjalan dengan baik sehingga daerah-daerah pelosok yang jauh dari BRI Kanca Majene dapat dilayani dengan baik.

Disposisi dalam implementasi kebijakan pemerintah melalui program UMKM pada BRI Kantor Cabang Majene, adalah terkait dengan sikap petugas lapangan yang belum secara maksimal dimana masih banyak komplein dari nasabah mengenai proses kredit yang masih dianggap lambat oleh nasabah. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pemerintah melalui program UMKM pada BRI Kantor Cabang Majene, meliputi dua hal yaitu mekanisme pelaksanaan program UMKM sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan struktur organisasi BRI Kantor Cabang Majene. pada BRI Cabang Majene dibuat sangat sederhana dan mudah dipahami oleh Nasabah khususnya pelaku UMKM, namun tentang pengurusan administrasi pemerintah setempat masih perlu dibenahi seperti pengurusan surat keterangan usaha untuk kelengkapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anfas, A. (2020). *Seni Mengelola Usaha UMKM*. Gorontalo: Ideas Publishing
- Astono, M., Ogotan, M., & Kiyai, B. (2019). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat di Kecamatan Tuminting Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(75), 1-5.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/23790/23440>
- Edward III, G. C. (1984). *Public Policy Implementing*. London-England: Jai Press Inc
- Eka, K. W., & Wulandary, R. M. C. (2019). Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(2), 100-108.
<https://doi.org/10.33366/jisip.v8i2.1724>

- Eriza, F. (2006). Implementasi Proyek Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Studi Deskriptif di Kabupaten Langkat). *Tesis*. Universitas Sumatera Utara, Medan
- Inpres. (2007). Inpres No. 6 Tanggal 08 Juni 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/11285>
- Kemenko Perekonomian. (2015). Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. https://diskopukm.jambiprov.go.id/file/file_dokumen/1562641641PERMEN_11_TAHUN_2017.pdf
- Lubis, M. S. (2007). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Presiden RI. (2008). Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>
- Rachmawati, I. K. (2012). Faktor Penentu Keberhasilan Program Kredit Usaha Rakyat terhadap Peningkatan Akses Permodalan di Propinsi Jawa Timur. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 16(1), 157–166. <https://media.neliti.com/media/publications/115713-ID-faktor-penentu-keberhasilan-program-kred.pdf>
- Tangkilisan, H. N. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Strategi, dan Kasus)*. Yogyakarta: YPAPI
- Wahab, S. A. (1990). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Malang: Bumi Aksara
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo